

**THE INFLUENCE OF HOTEL TAX, RESTAURANT TAX, RECLAIMING TAX
ON REGIONAL ORIGINAL INCOME IN MAKASSAR CITY REGIONAL
REVENUE OFFICE 2017 – 2021**

Sutriani^{1,2}
Marwah Yusuf
Anwar

Faculty of Economics and Business, STIEM Bongaya Makassar

Received 09 June 2023
Revised 18 August 2023
Accepted 20 September 2023

¹E-mail: sutriani854@gmail.com | ² Correspondence Author

ABSTRACT

Purpose – This study aims to determine the effect of hotel tax, restaurant tax, advertisement tax on regional original income at the Makassar City Regional Revenue Service for 2017-2021

Design/methodology/approach – The method of data analysis is using multiple linear regression techniques

Findings – The results of the study show that partially hotel taxes and advertisement taxes have an effect on the original regional income of the city of Makassar for the 2017-2022 period, while the restaurant tax has no effect on the original income of the city of Makassar

Originality – The sample in this study used a total of 60 months from January 2017 to December 2021

Keywords: Hotel Tax, Restaurant Tax, Advertisement Tax, Local Revenue

Paper Type Research Result



Contemporary
Journal on Business
and Accounting

© Institut
Transparansi dan
Akuntabilitas Publik
(INSPIRING)

**PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK REKLAME
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN
DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2017 – 2021**

Sutriani^{1,2}

Marwah Yusuf

Anwar

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, STIEM Bongaya Makassar

¹E-mail: sutrianiani854@gmail.com | ² Correspondence Author

ABSTRAK

Tujuan – Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui dampak retribusi penginapan, retribusi tempat makan, bea usaha terhadap upah khas daerah di Badan Penghasilan Daerah Daeah Makassar periode 2017-2021

Desain/metodologi/pendekatan – Strategi pemeriksaan informasi menggunakan berbagai metode relaps langsung

Temuan – Dampak lanjutan dari review menunjukkan bahwa bea penginapan dan penilaian niaga memdampaki upah teritorial pertama daeah Makassar periode 2017-2022, sedangkan retribusi tempat makan memdampaki gaji pertama daeah Makassar

Originalitas – Penelitian ini menggunakan jumlah 60 bulan dari Januari 2017 sampai dengan Desember 2021

Kata-kata Kunci: Biaya Penginapan, Biaya Kafe, Penilaian Promosi, Penghasilan Terdekat

Jenis Artikel *Research Result*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Substansi dari Kemandirian Daerah diketahui bahwa peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan bantuan pemerintah kepada daerah dengan mengurangi rantai kendali pemerintahan dimana setiap kabupaten mempunyai kedudukan untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Dengan demikian, setiap kabupaten juga memiliki posisi untuk menambah sumber-sumber penghasilan teritorial yang kemudian disalurkan untuk bantuan pemerintah dalam jangkauan penguasaannya. Penekanan pada peningkatan gaji lokal dapat diselesaikan dengan memajukan penghasilan dari tugas teritorial yang penting untuk Penghasilan Unik Provinsi (Bantalan). Pengeluaran daerah merupakan pendukung terbesar penghasilan suatu kabupaten (mia sukrawati, 2018).

Menurut pungutan, pemerintah provinsi harus menyelidiki sumber-sumber Penghasilan Bersih Daerah (Bantalan), yang penting untuk jenis penghasilan yang dapat digunakan secara bebas oleh setiap daerah untuk mengoorpemerintahan pemerintah dan kemajuan provinsi. Mengingat potensi yang dimiliki setiap daerah, peningkatan penerimaan Penghasilan Unik Teritorial ini sebenarnya ingin memperluas batas moneter daerah tersebut. Bersamaan dengan kemajuan, merampingkan penggunaan sumber penghasilan unik teritorial ternyata sangat penting. Semakin diperhatikan penghasilan dan tingkat penghasilan unik teritorial terhadap penghasilan lokal absolut, menunjukkan bahwa wilayah tersebut semakin bebas sesuai (Biringkanae, 2021).

Upah unik daerah merupakan dasar dari pembiayaan daerah, selanjutnya kemampuan untuk melakukan perekonomian diperkirakan dari seberapa besar komitmen yang dilakukan oleh pembayaran unik provinsi terhadap APBD, semakin menonjol komitmen yang dapat dilakukan oleh pembayaran unik daerah terhadap APBD menyiratkan semakin lebih sederhana ketergantungan pemerintah daerah pada bantuan pemerintah pusat (Mahmudi , 2010:16).

Penghasilan Kewilayahan Menurut Permendagri No.21 Periode 2011 dipisahkan menurut usaha pemerintah daerah, asosiasi, perkumpulan, jenis, butir dan seluk-beluk objek pembayaran. Gaji provinsi yang disinggung dikumpulkan menjadi: gaji unik teritorial, cadangan penyesuaian, dan gaji daerah lain yang sah. Sementara itu dalam PP No. 71 Periode 2010, cadangan penyesuaian diganti dengan istilah upah pindah, sehingga pengelompokan upah provinsi meliputi: upah daerah unik, upah pindah, dan upah teritorial lain yang sah.

Dengan kondisi tersebut, maka peningkatan biaya penginapan, biaya makan dan beban iklan pada penghasilan lingkungan di daerah Makassar yang tergabung dalam penghasilan pengakuan selama periode 2017 - 2021 diketahui bahwa sebagai berikut:

Tabel 1. Informasi Kekhasan Penerimaan Bea Penginapan, Biaya Kafe, Biaya Promosi dan Penghasilan Sekitar Daeah Makassar Periode 2017 - 2021

NO	PERIODE	RETRIBUSI	RETRIBUSI	RETRIBUSI	PENGHASILAN
		PENGINAPAN	TEMPAT MAKAN	REKLAME	BERSIH DAERAH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2017	92.971.091.185	141.867.931.067	31.602.486.375	938.796.384.191
2	2018	103.142.302.558	166.283.919.526	38.711.026.743	942.551.891.961
3	2019	121.487.321.553	211.329.363.125	53.641.688.525	1.067.323.035.834
4	2020	55.082.353.413	136.496.439.278	46.606.813.357	864.313.239.515
5	2021	75.884.289.009	145.249.417.820	49.092.268.589	931.753.569.992

Sumber : Administrasi Penghasilan Bersih Daerah Daeah Makassar

Mencermati tabel 1 di atas, tergambar bahwa keadaan Penilaian Penginapan, Biaya Kafe, Tugas Publikasi dan Penghasilan Bersih Lingkungan dalam penerimaan biaya penginapan normal paling tinggi pada periode 2019 menjadi Rp. 121.487.321.553 dan pengadaan biaya penginapan paling minim pada periode 2020 Rp 55.082.353.413. sedangkan keadaan penghasilan biaya kafe terbesar diketahui bahwa pada periode 2019 sebesar Rp. 211.329.363.125 dan pengamanan biaya makan yang paling rendah diketahui bahwa pada periode 2020 sebesar Rp. 136.496.439.278. serta status mendapatkan Bea Promosi paling tinggi khususnya di periode 2019 sebesar Rp. 53.641.688.357 dan perolehan bea pemberitahuan paling sedikit, khususnya pada periode 2017 berjumlah Rp. 31.602.486.375. Hal ini terjadi karena adanya pandemi virus Corona di awal periode 2020 yang mengakibatkan penurunan pembayaran bea penginapan dan retribusi kafe, sedangkan untuk bea promosi dikarenakan tidak adanya permintaan pembayaran bea masuk yang telah ditetapkan oleh Pemkot Makassar. administrasi penghasilan unik.

Berdasarkan data yang luar biasa di atas, ini menunjukkan bahwa ketika penghasilan biaya penginapan, biaya kafe, dan biaya iklan menurun, penerimaan penghasilan lokal tidak berkurang secara signifikan.

LANDASAN TEORI

Penghasilan Bersih Daerah

Sesuai (Naibaho et al., 2021), Penghasilan Bersih Daerah (Bantalan) merupakan sumber penghasilan teritorial yang berarti memberikan posisi kepada DPRD Provinsi untuk mensubsidi pelaksanaan perbaikan dan kemandirian daerah sesuai potensi daerah sebagai bentuk desentralisasi. Sebagaimana disinggung dalam Undang-Undang Nomor 33 Periode 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara DPRD Pusat dan DPRD Provinsi, Cushion diketahui bahwa gaji yang dapat diperoleh daerah-daerah yang dihimpun berdasarkan Pedoman Wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Demikian juga menurut (Mintahari dan Lambey, 2016) Local Unique Income (Cushion) diketahui bahwa kekuatan Pemerintah Provinsi dalam mendukung pelaksanaan pergantian wilayah, serta Penyesuaian Aset mulai dari Pemerintah Pusat dan berbagai jenis penghasilan. Bantalan Padat juga merupakan penggerak utama bagi terlaksananya kemerdekaan daerah secara efektif dan menjadi contoh kemerdekaan suatu daerah. Biaya Propinsi diketahui bahwa salah satu biaya yang diperhitungkan dalam Pembayaran Unik Teritorial (Bantal). Dalam UUD 1945, komitmen pungutan ditetapkan sebagai salah satu tanda komitmen kewarganegaraan dan sebagai implikasi yang berperan dalam pembiayaan negara dan kemajuan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dengan adanya Peraturan Nomor 28 Periode 2009 tentang Tugas Wilayah dan Tol Daerah memberikan posisi yang lebih menonjol kepada daerah dalam pemungutan retribusi. Penyelenggaraan pemerintahan dan latihan-latihan pembangunan meningkat secara konsisten sehingga kemerdekaan wilayah yang luas, hakiki dan mampu dapat dilaksanakan

Sesuai dengan Perda tentang Retribusi Daerah dan Bea Daerah Periode 2009, pengeluaran provinsi yang selanjutnya disinggung sebagai penilaian diketahui bahwa komitmen wajib kepada daerah yang terutang oleh orang atau zat yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan, dengan tidak segera mendapatkan imbalan dan dipergunakan untuk kepentingan daerah. untuk keberhasilan terbaik individu.

2. Sumber Penghasilan Terdekat yang Unik

a. Biaya lokal

Pengertian belanja daerah tergantung pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Periode 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Periode 2000 tentang Pembebanan dan Kewajiban Provinsi, tugas daerah diketahui bahwa komitmen wajib yang dilakukan oleh orang atau benda kepada masyarakat. kabupaten tanpa hadiah langsung yang adil yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan dan pedoman materiil, yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pergantian daerah. Sementara itu, pengertian tugas daerah Menurut (Rustam et al., 2021) Beban Wilayah diketahui bahwa penghasilan yang diperoleh pemerintah provinsi dan periode keuangan yang signifikan harus dilihat dari

tingkat perluasan sumber daya atau laju perluasan dalam sumber daya atau tingkat kewajiban berkurang yang dapat dimanfaatkan oleh otoritas publik selama pembangunan.

Seperti yang ditunjukkan oleh Peraturan no. 28 Periode 2009 tentang Penilaian Daerah dan Tol Wilayah, retribusi provinsi dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

Beban Biasa, terdiri dari:

- a. Pungutan kendaraan bermotor , merupakan kewajiban menguasai sekaligus menguasai kendaraan bermotor.
- b. Biaya transfer untuk kendaraan mekanis diketahui bahwa kewajiban atas pertukaran hak kepemilikan untuk kendaraan mekanik karena persetujuan dengan pihak atau kegiatan sepihak atau kondisi yang terjadi karena perdagangan, perdagangan, penghargaan, warisan, atau bagian menjadi elemen bisnis.
- c. Bahan bakar kendaraan bermotor , diketahui bahwa berbagai bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk mesin kendaraan.
- d. Muatan air permukaan, diketahui bahwa kewajiban atas pengambilan atau kemungkinan penggunaan air permukaan.
- e. Pungutan rokok , diketahui bahwa pungutan sari rokok yang dipungut oleh badan publik.

Retribusi peraturan/daeah terdiri dari:

- a. Biaya penginapan
- b. Biaya tempat makan
- c. Biaya hiburan
- d. Biaya iklan
- e. Biaya penerangan jalan
- f. Retribusi atas mineral bukan logam dan batuan
- g. Biaya parkir
- h. Tugas Air Tanah
- i. Tugas rumah burung dompet
- j. Biaya tanah dan bangunan pedesaan dan metropolitan
- k. Biaya untuk mengamankan tanah dan bangunan kebebasan.

Tidak semua tugas provinsi yang tercatat di atas dipungut oleh kabupaten, karena dalam hal kemampuan suatu daerah kurang maka suatu daerah tidak memungut biaya daerah sesuai strategi kewilayahan yang telah ditentukan oleh pedoman kewilayahan.

Pembalasan Daerah

Menurut Mardiasno, (2011) tuntutan diketahui bahwa tugas teritorial sebagai cicilan bagi pemerintah yang mengizinkan hibah khusus yang luar biasa atau yang berpotensi diberikan oleh pemerintah daerah untuk keuntungan orang atau zat. Seperti yang ditunjukkan oleh Yani, (2013) , pembalasan diketahui bahwa tugas terdekat sebagai angsuran untuk administrasi atau pemberian izin khusus yang diberikan secara eksplisit serta diberikan oleh pemerintah provinsi untuk melayani orang atau elemen. Sesuai (Rustam et al., 2021) tugas provinsi diketahui bahwa kedatangan sumber daya ke badan legislatif setempat untuk menangani masalah daerah.

Berdasarkan pengertian di atas, maka tuntutan diketahui bahwa tuntutan yang dilakukan oleh pejabat publik atas pelayanan yang diberikan oleh DPRD sebagai biaya yang dikumpulkan dan secara langsung mendapatkan ganti rugi secara langsung atas pembayaran tol tersebut.

Hasil Dewan Kelimpahan Propinsi Mandiri

Konsekuensi dari pengelolaan kelimpahan provinsi yang terisolasi diketahui bahwa hasil yang diperoleh dari pengelolaan kelimpahan yang terlepas dari pengelolaan Rencana Keuangan Penghasilan dan Konsumsi Daerah. Peraturan No. 33 Periode 2004 mencirikan macam-macam kekayaan teritorial hasil pengurusan yang dipisahkan, dipisahkan dengan objek upah yang mengingat porsi keuntungan untuk kepentingan pada badan usaha milik daerah/usaha milik daerah (BUMD), porsi keuntungan atas nilai dukungan dalam organisasi yang diklaim negara/BUMN dan pembagian keuntungan atas bunga dalam bisnis milik pribadi atau pertemuan lokal.

Penghasilan Bersih Terdekat Lainnya

Seperti yang ditunjukkan oleh Peraturan no. 34 Periode 2004 masuk akal bahwa bea teritorial dan bea daerah diakomodasi perencanaan penghasilan provinsi yang dikecualikan dari jenis-jenis pungutan daerah, dan akibat dari isolasi teritorial yang melimpah ruah. Berlanjut dari penawaran sumber daya provinsi yang tidak dapat dibagi, konsekuensi dari penggunaan atau penggunaan sumber daya yang tidak dapat dibedakan, administrasi catatan saat ini, pembayaran premi, klaim pembayaran, keuntungan dari perbedaan antara skala konversi rupiah dan standar moneter yang tidak dikenal, dan komisi, derivasi atau lainnya. struktur karena transaksi dan/atau perolehan produk serta administrasi oleh daerah.

Kerangka Assortment Retribusi

Kerangka pengelompokan biaya dipisahkan menjadi tiga, yaitu: Kerangka Evaluasi Resmi, Kerangka Penilaian Sendiri, dan Kerangka Pematangan

a. Kerangka Evaluasi Resmi

Kerangka Evaluasi Otoritas diketahui bahwa kerangka bermacam-macam yang menyetujui otoritas publik (fiskus) untuk memutuskan berapa banyak biaya yang harus dibayar oleh warga negara. Atributnya diketahui bahwa:

- 1) Kekuasaan untuk memutuskan berapa banyak utang terletak pada spesialis biaya.
- 2) Warga negara yang pasif
- 3) kewajiban perretribusi muncul setelah dikeluarkannya surat evaluasi beban

b. Evaluasi diri

Kerangka evaluasi diri diketahui bahwa kerangka bermacam-macam yang memberikan posisi penuh kepada warga negara untuk bekerja, menghitung, membayar dan melaporkan berapa banyak tugas yang harus dibayar sendiri. Kualitasnya diketahui bahwa:

- 1) Fiskus tidak ikut campur tapi hanya mengelola.
- 2) Warga negara aktif, mulai dari memastikan, menyimpan, dan mengumumkan sendiri kewajiban yang harus dibayar.
- 3) Posisi untuk memutuskan berapa banyak penilaian yang terhutang ada pada warga negara itu sendiri.

c. Kerangka pemotongan

Menjaga Kerangka kerja diketahui bahwa kerangka bermacam-macam tugas yang memberikan kekuatan kepada pihak luar (bukan spesialis biaya dan bukan warga negara yang bersangkutan). Kualitasnya diketahui bahwa posisi untuk memutuskan berapa banyak tugas yang harus dibayarkan kepada pihak luar, pihak selain spesialis penilai dan warga negara.

Kemampuan Perretribusi

Pekerjaan biaya, baik sebagai sumber penghasilan rumahan maupun sebagai pengaturan kegiatan keuangan di toko sangat penting bagi negara kita. Oleh karena itu, cara paling umum untuk mempersiapkan spesialis yang memadai di bidang pengumpulan retribusi serta membawa masalah ke pekerjaan warga daerah (pemain biaya) harus menjadi perhatian, semua hal dipertimbangkan. Ada 4 kemampuan penilaian, khususnya:

- a. Kemampuan Anggaran (Budgeter), pungutan merupakan sumber penghasilan negara yang bertujuan untuk mengimbangi penghasilan negara yang dinikmati.
- b. Mengatur Kemampuan (Pedoman), muatan diketahui bahwa alat untuk menjalankan atau mengendalikan strategi negara di bidang keuangan.
- c. Equity Capability (Conveyance), biaya dapat dimanfaatkan untuk mengubah dan menyesuaikan penyebaran upah dengan suka cita dan bantuan pemerintah dari masyarakat.

- d. Kemampuan stabilisasi, pengeluaran secara efektif menyeimbangkan kondisi dan keadaan ekonomi, misalnya untuk mengalahkan ekspansi dan pengosongan

Tugas Penginapan

Pengertian Biaya Penginapan

Sesuai (Marihot Pahala, 2010: 303) pada beban penginapan yang menjadi subyek pungutan diketahui bahwa orang atau benda yang menyebabkan angsuran kepada orang atau unsur yang bekerja pada penginapan, sedangkan pengertian beban penginapan menurut Peraturan No. 28 Periode 2009 beban penginapan diketahui bahwa tugas untuk administrasi penginapan. Arti penginapan di sini termasuk rumah tinggal yang memungut biaya. Untuk dapat menegakkan kisaran harga penginapan, pemerintah daerah harus terlebih dahulu memberikan pedoman provinsi tentang tarif penginapan itu sendiri. Pedoman teritorial untuk bea penginapan tertuang dalam juklak provinsi no. 3 Periode 2010 tentang Retribusi Daerah Daeah Makassar. Dalam pungutan retribusi penginapan ada beberapa susunan kata yang harus diketahui, susunan kata sesuai juklak Nomor 3 Periode 2010 harus terlihat sebagai berikut:

- a. Penginapan diketahui bahwa suatu bangunan yang secara tegas diberikan kepada orang-orang untuk dapat tinggal atau beristirahat, mendapatkan pelayanan dan berbagai kantor secara cuma-cuma, termasuk berbagai bangunan yang didirikan, diawasi dan dimiliki oleh pihak yang sejenis kecuali toko dan tempat kerja.
- b. Rumah-rumah penginapan tinggal dalam struktur dan karakter apa pun di samping kantor yang digunakan untuk kunjungan jangka pendek dan disewakan kepada masyarakat umum.
- c. Penglihatan bisnis perpenginapanan diketahui bahwa individu atau elemen dalam setiap struktur yang di dalam organisasi atau tempat kerja menjalankan bisnis di bidang administrasi perumahan.
- d. Pembayaran diketahui bahwa jumlah yang diperoleh atau seharusnya diperoleh dalam bentuk barang untuk pengangkutan tenaga kerja dan barang-barang sebagai cicilan kepada pemilik penginapan.
- e. Nota pesanan atau kuitansi transaksi (tagihan) diketahui bahwa bukti angsuran, yang sekaligus berfungsi sebagai penegasan pembagian tugas, yang dibuat oleh warga negara pada saat penyerahan angsuran penggunaan kamar atau tempat tinggal berdampingan dengan kantor penunjang lainnya kepada subjek biaya.

Alasan Hukum Ketidaknyamanan Penilaian Penginapan

Alasan yang Sah Memaksakan Tugas Penginapan Alasan yang sah dari pemilahan tarif penginapan diketahui bahwa menurut Pahala berikut, (2010: 301)

- a. Undang -Undang Nomor 28 Periode 2009 tentang belanja provinsi dan tol wilayah.
- b. Undang -Undang Nomor 34 Periode 2000 yang merupakan perubahan atas Peraturan Nomor 18 Periode 1997 tentang tugas daerah dan tugas provinsi.
- c. Pedoman Pemerintah Nomor 65 Periode 2001 tentang Pengeluaran Daerah.
- d. Perda Kabupaten/Daeah yang membidangi retribusi penginapan dan rumah makan (khusus Daeah Makassar, yaitu Perda No. 3 Periode 2010 tentang Retribusi Daerah Daeah Makassar).
- e. Pilihan pejabat/ketua pengelola retribusi penginapan merupakan pedoman pelaksanaan dari pedoman daerah retribusi penginapan di daerah/daeah tersebut.

Artikel dan Subjek Biaya Penginapan

Pasal Retribusi

Pasal Bea Cukai diketahui bahwa administrasi yang dilengkapi dengan penginapan dengan angsuran, termasuk administrasi pendukung sebagai perlengkapan penginapan yang memberikan akomodasi dan kenyamanan, termasuk kantor olah raga dan hiburan. Layanan pendukung yang dimaksud diketahui bahwa telepon, fotokopi, web, fotokopi, cuci, percetakan, transportasi dan kantor serupa lainnya yang disediakan atau diawasi oleh penginapan.

- 1) Penilaian penginapan yang dikecualikan dari objek pembebanan penginapan diketahui bahwa: administrasi kenyamanan penginapan yang diberikan oleh otoritas publik atau pemerintah terdekat;
- 2) Administrasi persewaan kondominium, townhouse, dan semacamnya;
- 3) Administrasi perumahan pada fokus pendidikan atau latihan yang ketat;
- 4) Administrasi perumahan di klinik darurat, tempat pengasuhan, panti jompo, tempat penampungan dan organisasi sosial lain yang sebanding dan,
- 5) Perjalanan pemerintahan pemerintahan atau perjalanan wisata yang dikoorpemerintahan dengan penginapan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Subjek Tugas Penginapan

Subyek biaya penginapan diketahui bahwa orang atau unsur yang menyebabkan pembayaran kepada orang atau zat yang bekerja di penginapan.

Biaya Tempat Makan

Tugas tempat makan

Sebagaimana dikemukakan oleh Pahala, (2010: 324) mengatakan bahwa retribusi kafe merupakan kewajiban atas administrasi yang diberikan oleh rumah makan, sedangkan pengertian retribusi tempat makan menurut UU No. 28 Periode 2009 retribusi tempat makan diketahui bahwa kewajiban pada administrasi kafe. Untuk dapat melembagakan pemilihan tarif tempat makan, pemerintah setempat harus terlebih dahulu memberikan pedoman provinsi tentang tarif kafe itu sendiri. Pedoman wilayah retribusi rumah makan tertuang dalam Perda No. 3 Periode 2011. Dalam pemungutan retribusi kafe ada beberapa susunan kata yang harus diketahui, ungkapan sesuai

Pedoman Daerah No. 3 Periode 2010 harus terlihat sebagai berikut:

- a. Tempat makan diketahui bahwa tempat untuk makan makanan serta minuman yang disediakan secara cuma-cuma, termasuk kafe, food court, bar, bistro dan semacamnya, kecuali organisasi catering yang tak ada habisnya.
- b. Pemilik tempat makan diketahui bahwa orang atau zat yang menjalankan organisasi tempat makan, untuk dan untuk kepentingan mereka sendiri atau untuk dan untuk berbagai perkumpulan yang menjadi lingkungannya.
- c. Pembayaran diketahui bahwa jumlah yang diperoleh atau seharusnya diterima sebagai pembayaran atas pengangkutan barang dan tambahan keuntungan sebagai hutang retribusi = Tarif Biaya X Dasar Pemungutan Retribusi = Tarif Biaya X Ukuran Cicilan atau Hutang ke Penginapan Cicilan ke Rumah Makan/Kafe, Bistro , bar visioner bisnis dan kepeduliannya.
- d. Nota pesanan atau bill of offer (bill) diketahui bahwa bukti cicilan, yang juga merupakan bukti penilaian bermacam-macam, yang dibuat oleh warga negara pada saat mengajukan permohonan cicilan untuk pelayanan di kafe/tempat makan, bistro, bar dan semacamnya yang mencakup penawaran makanan sebagai serta minuman termasuk pengaturan penawaran makanan dan minuman yang diantar dan dibawa pulang

Obyek dan subyek pungutan tempat makan

Objek Penilaian Eatery diketahui bahwa administrasi yang diberikan oleh kafe. Bantuan yang dimaksud diketahui bahwa bantuan penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi pembeli, baik yang dimakan di pusat administrasi maupun di tempat lain.

Tidak mengecualikan objek Cafe Duty sebagai administrasi yang diberikan oleh Tempat makan yang nilai transaksinya tidak melebihi Rp 251.000 (200 dan 51.000 rupiah) dalam 1 (pada titik tertentu. Subjek Cafe Duty diketahui bahwa orang atau bahan yang membeli makanan atau minuman potensial dari tempat makan. Warga Kafe diketahui bahwa orang atau zat yang menjalankan tempat makan.

Biaya Iklan

Pengertian Biaya Publikasi

Seperti yang ditunjukkan oleh Pahala, (2010: 381), biaya promosi merupakan kewajiban atas pelaksanaan iklan. Sedangkan yang dimaksud dengan pengumuman diketahui bahwa benda, peralatan, kegiatan atau media dalam struktur dan contoh yang berbeda untuk alasan bisnis untuk menyajikan, mendukung, mengangkat atau menarik perhatian terbuka mengenai barang dagangan, administrasi, individu atau zat. yang seharusnya dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, atau berpotensi diapresiasi oleh orang pada umumnya. Sesuai Perda Nomor 3 Periode 2010 Tentang Retribusi Provinsi Daeah Makassar Bagian VI Pasal 26 Ayat 1, Biaya Promosi merupakan kewajiban yang wajib dilakukan untuk penyelenggaraan iklan.

Butir dan Topik Penilaian Periklanan

Sesuai Perda Nomor 3 Periode 2010 tentang Penilaian Wilayah Daeah Makassar Bagian VI Pasal 26 Ayat 2, obyek biaya niaga diketahui bahwa semua organisasi iklan. Objek tugas yang direncanakan diketahui bahwa:

- a. Papan/papan buletin/videotron/megatron dan semacamnya;
- b. Iklan kain;
- c. buletin tempel, stiker;
- d. Iklan selebaran;
- e. Iklan berjalan, mengingat kendaraan
- f. iklan udara;
- g. iklan mengambang;
- h. iklan suara;
- i. Iklan film/slide, dan menampilkan pemberitahuan.

Protes biaya iklan yang dikecualikan sebagai objek bea komersial diketahui bahwa:

- 1) menyelenggarakan iklan melalui web, TV, radio, berita harian, berita minggu demi minggu, berita bulan ke bulan, dan sebagainya;
- 2) nama/merek produk yang digabungkan dengan barang dagangan yang dipertukarkan, yang membedakannya dari barang pembanding lainnya;
- 3) nama bisnis atau ID pemanggil yang dilampirkan pada struktur tempat bisnis ahli diadakan sesuai pengaturan yang mengawasi nama bisnis atau bukti pembeda panggilan;
- 4) Iklan yang diselenggarakan oleh Badan Publik atau Pemerintah Daerah, Perhimpunan Kelompok Rakyat, Kelompok Ideologi, Yayasan Sosial, Tegas dan Edukatif tanpa menggunakan nama/merek barang tukar

Sesuai Pedoman Wilayah Nomor 3 Periode 2010 tentang Pembelanjaan Daerah Makassar Bagian VI Pasal 27 Ayat 1-2, Subyek Bea Dagang diketahui bahwa orang atau zat yang memanfaatkan promosi dan warga negara reklame diketahui bahwa orang atau unsur yang mengatur pemberitahuan. .

Kerangka Konseptual

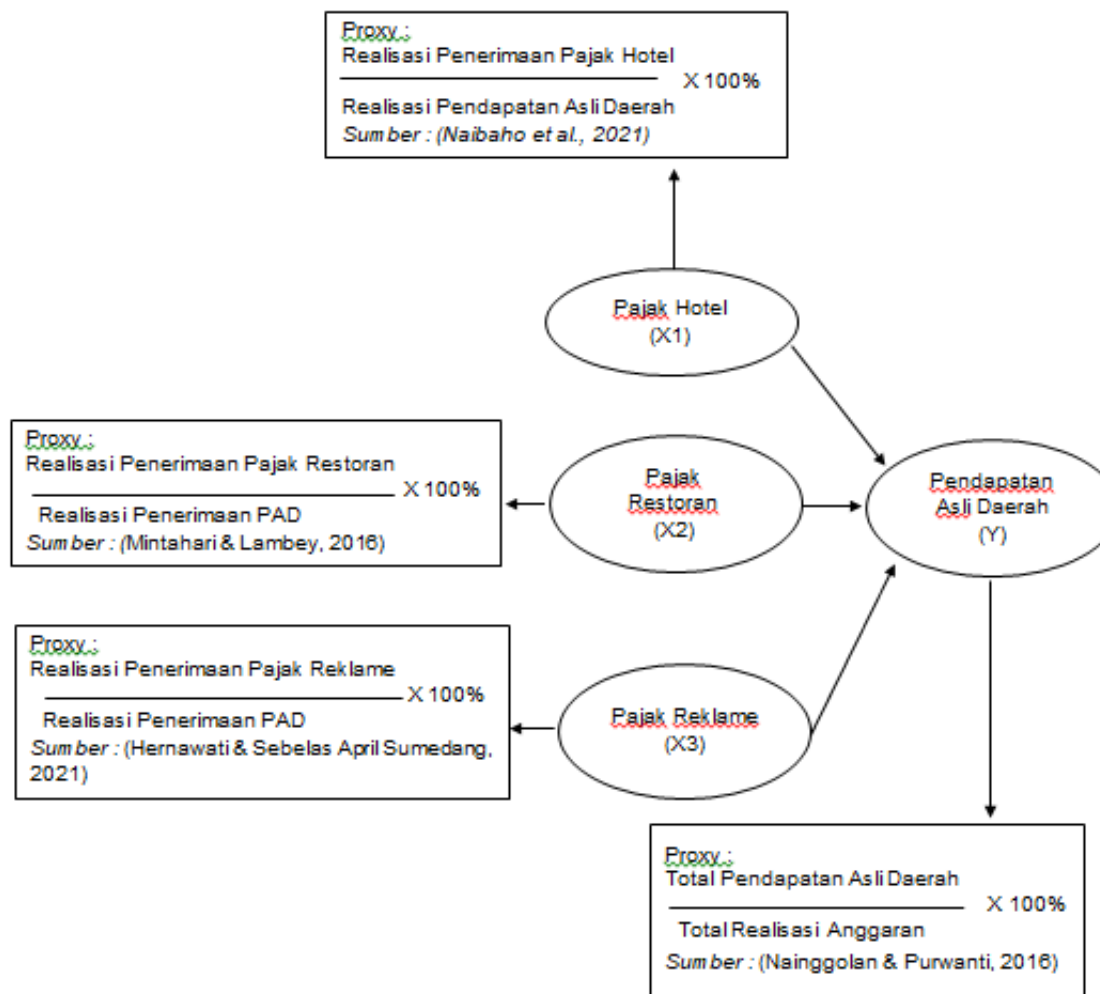
Struktur penalaran diketahui bahwa klarifikasi singkat tentang efek samping yang menjadi objek masalah. Model fundamental dari struktur penalaran diketahui bahwa perkembangan kontemplasi yang konsisten dari berbagai spekulasi yang telah digambarkan yang kemudian diselidiki secara mendasar dan efisien untuk mengantarkan hubungan antara faktor-faktor yang diteliti untuk membentuk teori.

Sesuai (Hernawati dan Eleven April Sumedang, 2021) Mata Air Penghasilan Bersih Daerah (Bantalan) diketahui bahwa gaji yang diterima oleh DPRD untuk mendanai biaya dari komitmen mereka untuk menangani keluarga provinsi, yang terdiri dari hibah atau alokasi pemerintah daerah, belanja daerah, daerah tugas, dan lain-lain. Untuk situasi ini, retribusi lokal merupakan mata air pembayaran teritorial yang memainkan peran utama untuk dukungan lokal.

Menurut (Pahala, 2010: 303) biaya penginapan yang menjadi subjek biaya diketahui bahwa orang atau unsur yang menyebabkan angsuran kepada orang atau zat yang mengerjakan penginapan. Sesuai (Pahala, 2010: 324) mengatakan bahwa biaya kafe diketahui bahwa kewajiban atas administrasi yang diberikan oleh tempat makan.

Seperti yang ditunjukkan oleh (Pahala, 2010: 381) , biaya iklan diketahui bahwa kewajiban untuk mengadakan iklan. Sedangkan yang dimaksud dengan buletin diketahui bahwa benda, perangkat, kegiatan atau media dalam struktur dan contoh yang berbeda untuk alasan bisnis untuk menyajikan, mendorong, mengangkat atau menarik secara terbuka untuk barang dagangan, administrasi,

individu atau zat. yang harus dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan juga dinikmati oleh masyarakat luas.



Gambar 1.
Sistem Terapan

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini diketahui bahwa pendekatan pemeriksaan informasi kuantitatif dan jika dilihat dari alasan dan sifat eksplorasi ini, eksplorasi ini bersifat jelas, yaitu strategi pemeriksaan yang dilakukan melalui persepsi untuk mendapatkan data tentang masalah tertentu dan untuk mendapatkan gambaran pengakuan dan komitmen tugas penginapan dan retribusi kafe pada Pay (Bantal) Unik Provinsi di Daeah Makassar.

Lokasi dan musim pemeriksaan

Eksplorasi ini dilakukan kreator dengan tiada henti mengumpulkan informasi tentang retribusi penginapan, penilaian kafe, dan retribusi iklan di Pemerintahan Penghasilan Daerah (DISPENDA) Daeah Makassar. Pemeriksaan ini akan dilakukan selama kurang lebih 2 bulan mulai November hingga batas terjauh Desember 2022.

Populasi dan Tes

Populasi

Penduduk diketahui bahwa suatu wilayah yang dirangkum yang terdiri dari benda-benda/subjek yang memiliki ciri-ciri tertentu yang masih diudara oleh para ilmuwan untuk dikonsentrasikan dan kemudian ditarik ujungnya (Sugiyono, 2017). Maka dalam ulasan ini, semua informasi tentang pengakuan penghasilan lingkungan (Cushion) dan informasi tentang pengakuan biaya penginapan, bea tempat makan dan biaya promosi digunakan oleh masyarakat. Khususnya, biaya penginapan, biaya kafe dan biaya pemberitahuan di Daeah Makassar periode 2017-2021 .

Tes

Contoh penting untuk jumlah dan kualitas yang digerakkan oleh populasi Sugiyono, (2017: 81) Strategi pemilihan contoh dalam penelitian ini diketahui bahwa Inmmersed Examining, Soaked Testing diketahui bahwa metode pemeriksaan ketika semua individu dari populasi dites (Sugiyono, 2017) berapa banyak informasi yang digunakan sebagai contoh dalam ulasan ini, untuk menjadi informasi khusus tentang pengakuan penghasilan unik provinsi untuk daeah Makassar dan penghasilan dari biaya penginapan, biaya makan dan biaya pemberitahuan di Daeah Makassar setiap bulan selama 5 (lima) periode yang terdiri dari periode 2017-2021, khususnya 60 informasi tentang pengakuan local unique pay for city. Makassar dan penghasilan retribusi penginapan, bea kafe dan retribusi di Daeah Makassar.

Metode pengumpulan informasi

Jenis informasi yang digunakan oleh pembuat diketahui bahwa jenis informasi yang digunakan dalam penelitian ini diketahui bahwa informasi deret waktu, yaitu informasi deret waktu atau informasi yang dibawa oleh penghasilan penghasilan dan biaya penginapan unik lokal, tugas kafe, dan biaya promosi. yang digunakan diketahui bahwa informasi dengan rentang waktu persepsi 2017-2021

1. Pengurutan Data

Dalam menyelesaikan eksplorasi ini, jenis informasi yang digunakan diketahui bahwa informasi kuantitatif, seharusnya bersifat kuantitatif karena informasi tersebut bersifat matematis atau angka yang dapat dibedah menggunakan pengukuran (Sugiyono, 2017: 224).

2. Sumber data

Informasi yang digunakan dalam penelitian ini diketahui bahwa informasi Opsional yang merupakan rangkaian periode dari periode 2017 sampai dengan periode 2021. Informasi tersebut meliputi penghasilan retribusi penginapan, retribusi tempat makan, bea selingan dan penghasilan lingkungan, yang diperoleh dari Badan Penghasilan Daerah Daeah Makassar. Berbagai informasi diperoleh dari web, buku, dan laporan tertulis lainnya.

Prosedur pemilihan data

Prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dalam penelitian ini diketahui bahwa strategi dokumentasi, yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan mengungkapkan yang berkaitan dengan objek eksplorasi untuk membantu informasi yang ada. Selain itu, pengumpulan informasi untuk penelitian ini langsung ke daerah eksplorasi, yaitu Organisasi Pengkajian dan Balas Dendam Teritorial Daeah Makassar sehubungan dengan penghasilan upah dan biaya penginapan khas provinsi, biaya kafe dan biaya pemberitahuan.

Definisi Operasional dan Estimasi Variabel

1. Definisi operasional

Sesuai hubungan antara variabel dan lainnya

Faktor , ada dua macam faktor dalam ulasan ini, yaitu faktor bebas dan variabel terikat.

2. Faktor Bebas (Faktor Otonom)

Faktor bebas diketahui bahwa faktor yang memdampaki atau menyebabkan perubahan atau timbulnya variabel terikat. Faktor otonomi yang digunakan dalam penelitian ini diketahui bahwa informasi penghasilan retribusi penginapan, retribusi kafe dan retribusi hiburan periode 2017-2021 di Daeah Makassar.

Faktor bebas diketahui bahwa sebagai berikut:

Inn Duty (X1) diketahui bahwa biaya administrasi yang diberikan oleh pihak penginapan. Untuk mendapatkan perantara biaya penginapan, gunakan resep berikut ini:

Retribusi penginapan = (Realisasi Penerimaan Retribusi Penginapan) / (Realisasi Penghasilan Bersih Daerah) x 100 persen

Sumber: (Naibaho et al., 2021)

Eatery Duty (X2), yaitu biaya administrasi yang diberikan oleh kafe. Untuk mendapatkan perantara biaya kafe, gunakan persamaan berikut:

Retribusi tempat makan = (Realisasi Penerimaan Retribusi Tempat makan) / (Realisasi Penghasilan Bersih Daerah) x 100 persen

Sumber: (Mintahari dan Lambey, 2016)

Notice Duty (X3) diketahui bahwa biaya yang dibebankan pada pelaksanaan promosi. Untuk mendapatkan perantara biaya pemberitahuan, gunakan resep berikut

Retribusi reklame = (Realisasi Penerimaan Retribusi Reklame) / (Realisasi Penghasilan Bersih Daerah) x 100 persen

Sumber: (Hernawati dan Sebelas April Sumedang, 2021)

Variabel Terikat (Variabel Bawahan)

Variabel dependen diketahui bahwa variabel yang didampaki atau berubah menjadi hasil sehubungan dengan faktor bebas. Dalam tinjauan ini ada satu variabel kelurahan yang digunakan, yaitu Pay (Bantal) Unik Teritorial Daeah Makassar. Untuk mendapatkan perantara pembayaran khusus provinsi, gunakan resep berikut

PAD = (Semua Penghasilan Bersih Daerah) / (Realisasi Anggaran Lengkap) x 100 persen

Sumber: (Nainggolan dan Purwanti, 2016)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Gambaran Umum

Administrasi Penghasilan Daerah (DISPENDA) Daeah Makassar

Pemerintahan Penghasilan Daerah (Dispenda) Daeah Makassar diketahui bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Daeah Makassar yang mempunyai tugas membantu ketua dalam melengkapi unsur penunjang penyelenggaraan pemerintahan di bidang moneter yang menjadi kewenangan kabupaten. tertuang dalam Pedoman Ketua Umum Makassar Nomor 110 Periode 2016 tentang Kedudukan, Susunan Hirarki, Kewajiban dan Tata Kerja serta Tata Kerja Organisasi Penghasilan Bersih Daerah.

- 1) Desain otoritatif
- 2) Kepala tubuh
- 3) Sekretariat, ada:
- 4) Mengatur dan merinci sub-segmen.

- 5) Sub-segmen keuangan.
- 6) Subbagian umum dan kepegawaian.
- 7) Bidang pendaftaran dan pengumpulan informasi terdiri dari:
- 8) Sub-bidang pemilahan informasi provinsi I.
- 9) Subbidang pemilahan informasi Area II.
- 10) Sub bidang informasi dan data papan.
- 11) Bidang tugas I dan tol dalam negeri, terdiri dari:
- 12) Kafe, sub-area mineral dan batubara dan burung walet.
- 13) Sub-bidang pengumuman, pemberhentian dan balas dendam lokal.
- 14) Sub-bidang penjaminan, pembukuan dan pengumuman pengeluaran lokal dan eksak.
- 15) Daerah tugas daerah II, terdiri dari:
- 16) Sub-area penginapan dan air bawah tanah.
- 17) Subbidang retribusi pengalihan dan penerangan jalan.
- 18) Sub-bidang penjaminan, akuntansi dan perincian tugas.
- 19) Bidang koorpemerintahani, pengelolaan dan penataan, meliputi:
- 20) Subbidang koorpemerintahani, penataan dan pembinaan.
- 21) Penilaian provinsi membebaskan tugas sub-bidang dan teritorial.
- 22) Sub bidang perbaikan, pengelolaan dan kebutuhan.
- 23) Gathering yang Bermanfaat.
- 24) Unit Pelaksana Khusus (UPT).
- 25) Penggambaran Informasi Faktor Eksplorasi

Penelitian ini memanfaatkan informasi pengakuan penghasilan retribusi penginapan, retribusi tempat makan, retribusi promosi dan penghasilan provinsi Daeah Makassar serta fokus penghasilan retribusi penginapan, retribusi kafe, retribusi nota dan pengakuan penghasilan daerah daeah Makassar periode 2017-2021. Pengtesan diselesaikan dengan menggunakan metode pengtesan terbenam di mana seluruh contoh diambil dari masyarakat. Berapa banyak informasi dilihat dari persepsi diketahui bahwa 60 informasi dari Bappenda periode 2017-2021 .

Penggambaran informasi dari faktor-faktor pemeriksaan yang digunakan meliputi Penilaian Penginapan (X1), Bea Makan (X2), Biaya Publikasi (X3) dan Penghasilan Bersih Sekitar (Y). Mengingat informasi target dan pengakuan penghasilan retribusi penginapan, retribusi tempat makan, bea masuk, dan penghasilan bersih daerah pada periode 2017-2021 diketahui bahwa sebagai berikut:

Tabel 2. Sirkulasi Informasi Eksplorasi

Retribusi Penginapan						
No	Bulan	Periode				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Januari	1.07	1.11	1.09	1.12	1.06
2	Februari	1.06	1.08	1.06	1.09	1.05
3	Maret	1.05	1.08	1.07	1.09	1.06
4	April	1.09	1.09	1.08	1.02	1.07
5	Mei	1.08	1.11	1.08	1.00	1.06
6	Juni	1.06	1.08	1.06	1.01	1.07
7	Juli	1.06	1.07	1.09	1.01	1.07
8	Agustus	1.11	1.11	1.14	1.02	1.04
9	September	1.11	1.09	1.13	1.03	1.06
10	Oktober	1.10	1.09	1.13	1.05	1.08
11	November	1.11	1.10	1.13	1.10	1.10
12	Desember	1.10	1.13	1.14	1.08	1.13

Sumber: Informasi ditangani , 2022

Retribusi Tempat makan						
No	Bulan	Periode				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Januari	1.08	1.18	1.22	1.25	1.13
2	Februari	1.11	1.16	1.15	1.22	1.12
3	Maret	1.11	1.14	1.14	1.17	1.12
4	April	1.12	1.15	1.15	1.08	1.12
5	Mei	1.12	1.15	1.15	1.04	1.13
6	Juni	1.11	1.14	1.16	1.05	1.17
7	Juli	1.14	1.17	1.18	1.12	1.14
8	Agustus	1.15	1.16	1.17	1.11	1.11
9	September	1.14	1.15	1.16	1.12	1.11
10	Oktober	1.15	1.16	1.19	1.11	1.13
11	November	1.15	1.10	1.18	1.14	1.17
12	Desember	1.14	1.16	1.22	1.16	1.18

Sumber: Informasi ditangani, 2022

Retribusi Reklame						
No	Bulan	Periode				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Januari	1.01	1.04	1.03	1.08	1.05
2	Februari	1.01	1.05	1.04	1.03	1.03
3	Maret	1.04	1.03	1.04	1.02	1.03
4	April	1.02	1.03	1.04	1.03	1.03
5	Mei	1.02	1.02	1.04	1.02	1.03
6	Juni	1.02	1.02	1.02	1.01	1.03
7	Juli	1.04	1.04	1.04	1.04	1.03
8	Agustus	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03
9	September	1.04	1.04	1.04	1.06	1.05
10	Oktober	1.04	1.03	1.08	1.04	1.08
11	November	1.04	1.05	1.04	1.06	1.07
12	Desember	1.11	1.11	1.09	1.10	1.08

Sumber: Informasi ditangani, 2022

Penghasilan Bersih Daerah						
No	Bulan	Periode				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Januari	1.75	1.73	1.75	1.94	1.80
2	Februari	1.75	1.73	1.75	1.94	1.80
3	Maret	1.75	1.73	1.75	1.94	1.80
4	April	1.75	1.73	1.75	1.94	1.80
5	Mei	1.75	1.73	1.75	1.94	1.80
6	Juni	1.75	1.73	1.75	1.94	1.80
7	Juli	1.75	1.73	1.75	1.94	1.80
8	Agustus	1.75	1.73	1.75	1.94	1.80
9	September	1.75	1.73	1.75	1.94	1.80
10	Oktober	1.75	1.73	1.75	1.94	1.80
11	November	1.75	1.73	1.75	1.94	1.80
12	Desember	1.75	1.73	1.75	1.94	1.80

Sumber: Informasi ditangani, 2022

Kecurigaan gaya lama Hasil eksperimen

Tes kecurigaan teladan dalam ulasan ini terdiri dari tes biasa, tes multikolinearitas, dan tes heteroskedastisitas dengan hasil yang menyertai:

Tesan biasa

Hasil Tes Tes Kebiasaan

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,06965682
	Absolute	,136
Most Extreme Differences	Positive	,136
	Negative	-,074
Kolmogorov-Smirnov Z		1,052
Asymp. Sig. (2-tailed)		,218
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

Sumber: www.idx.co.id (informasi akan ditangani periode 2022)

Tes Multikolinearitas

Berikutnya diketahui bahwa efek samping dari tes multikolinearitas:

Hasil tes multikolinearitas		
Coefficients^a		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
X1	,420	2,379
X2	,413	2,423
X3	,818	1,223

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Adaptasi SPSS 23 (Informasi ditangani 2022)

Tes Heteroskedastisitas .

Berikut diketahui bahwa efek samping dari tes lapisan es:

Hasil tes lapisan es					
Coefficients^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	-,015	,008		-1,820	,074
X1	-,004	,003	-,294	-1,508	,137
X2	,008	,003	,473	2,404	,196
X3	,001	,002	,031	,225	,823

a. Dependent Variable: LNABSRES

Sumber: Varian SPSS 23 (Informasi ditangani 2022)

Investigasi relaps langsung yang berbeda

Berikut diketahui bahwa konsekuensi dari investigasi relaps langsung yang berbeda:

Investigasi Kekambuhan Lurus					
Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	4,414	,070		63,001	,000
X1	-,113	,021	-,846	-5,333	,000
X2	,044	,027	,255	1,596	,116
X3	,051	,020	,290	2,546	,014

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Formulir SPSS 23 (Informasi ditangani 2022)

Teknik Investigasi

Pemeriksaan faktual yang tidak diragukan lagi

Berikut ini diketahui bahwa konsekuensi dari pemeriksaan terukur yang memukau:

Efek samping dari Investigasi Terukur yang Mencerahkan

Descriptive Statistics			
	N	Mean	Std. Deviation
X1	60	2,7475	,67772
X2	60	3,7510	,53036
X3	60	1,9920	,51816
Y	60	4,3681	,09050
Valid N (listwise)	60		

Sumber: Adaptasi SPSS 23 (Informasi ditangani 2022)

Hasil pengtesan spekulasi

Tes tes nelayan

Berikut diketahui bahwa konsekuensi dari Tes F:

Hasil tes Fisher .

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	,197	3	,066	12,840	,000 ^b
Residual	,286	56	,005		
Total	,483	59			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

Sumber: Formulir SPSS 23 (Informasi ditangani 2022)

Tes Understudy Tes

Berikut diketahui bahwa efek samping dari tes T:

Pelajari hasil Eksperimen .

Model	Coefficients ^a				t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	4,414	,070			63,001	,000
X1	-,113	,021	-,846		-5,333	,000
X2	,044	,027	,255		1,596	,116
X3	,051	,020	,290		2,546	,014

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Formulir SPSS 23 (Informasi ditangani 2022)

Koefisien Asurans (R 2)

Berikut diketahui bahwa efek samping dari tes koefisien jaminan:

Koefisien Hasil Jaminan (R 2)				
Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,638 ^a	,408	,376	,07150

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Varian SPSS 23 (Informasi ditangani 2022)

KESIMPULAN

Penelitian ini diharapkan dapat melihat dampak dari retribusi penginapan, retribusi tempat makan, bea niaga terhadap upah unik daerah pada administrasi upah unik wilayah daeah Makassar periode 2017-2021, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Retribusi penginapan memdampaki penghasilan sekitar Daeah Makassar periode 2017-2021
- 2) Pengeluaran Tempat makan memdampaki penghasilan bersih daerah daeah Makassar periode 2017-2021
- 3) Bea Reklame berdampak terhadap Penghasilan Bersih Daerah Daeah Makassar Periode 2017-2021

Saran

Sehubungan dengan tujuan akhir, ide-ide yang menyertainya dapat diberikan:

- 1) Pemerintah Daerah Makassar seharusnya memiliki opsi untuk menaikkan retribusi penginapan dengan mengarahkan pemeriksaan dan peninjauan adat terhadap pembukuan warga. Untuk memperluas tingkat komitmen biaya penginapan.
- 2) Bagi DPRD Daerah Makassar yang terdekat, seluruh perangkat daerah atau organisasi yang berkaitan dengan perizinan, pengaturan dan bermacam-macam biaya niaga dan retribusi kafe perlu mengambil langkah tegas yang bertentangan dengan prinsip yang masih mengudara, meningkatkan upaya ke daerah area dan dalam setiap kasus mengumpulkan informasi untuk meningkatkan penghasilan biaya pemberitahuan dan biaya tempat makan.
- 3) Bagi masyarakat Daerah Makassar, memahami pentingnya membayar pungutan daerah untuk kemajuan suatu daerah sangatlah penting.
- 4) Untuk ilmuwan masa depan, lebih baik untuk menambahkan faktor-faktor yang berbeda untuk dapat menggambarkan secara lebih rinci dampak pada gaji provinsi pertama daerah Makassar. Karena dilihat dari hasil tes koefisien jaminan diketahui bahwa variabel otonom dapat memahami variabel terikat sebesar 40,8 %, sedangkan kelebihan 59,2% didampaki oleh faktor-faktor lain di luar ulasan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Biringkanae, A. (2021). DAMPAK BIAYA Penginapan, Biaya Makan, Penilaian Diversi TERHADAP Gaji Daerah PADA Rezim TANA TORAJA. 4 (1), 16-21.
- Hernawati, R., dan Sebelas April Sumedang, S. (2021). Dampak Kecukupan Komitmen dan Kemungkinan Penilaian Publikasi terhadap Penghasilan Unik Teritorial. *Buku Harian Ilmu Ritel Eksekutif (JIMAT)*, 2(1).
- Mahmudi. (2010). Eksekusi Area Publik Eksekutif , Rilis Kedua (U. Distributer dan PAMP YKPN (eds.)).
- Mardiasno. (2011). penilaian retribusi . Offset Andi.
- nia sukmawati, jauzar farouq ishak. (2018). Dampak sosialisasi komitmen retribusi dan retribusi tempat makan terhadap penghasilan masyarakat daeah Bandung. *Dampak Komitmen Bea Masuk Iklan dan Pengeluaran Rumah Makan terhadap Bayaran Unik Lokal di Daeah Bandung* .
- Mintahari, M., dan Lambey, L. (2016). Kajian Komitmen Kewajiban Kafe Terhadap Penghasilan Terdekat (Cushion) Perda Minsel Periode 2012-2014. *Buku Harian Eksplorasi Keuangan, Para Eksekutif, Bisnis dan Pembukuan* , 4(2), 641-651 .
- Naibaho, F., Sondakh, JJ, dan Tangkuman, S. (2021). Penilaian Kecukupan dan Komitmen Penginapan terhadap Penghasilan Sekitar (Bantalan) Kelayakan dan Komitmen Tugas Penginapan terhadap Penghasilan Lingkungan (Bantalan). 105 *Buku Harian EMBA* , 9 (3), 105-112. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/34600>
- Nainggolan, AT, dan Purwanti, D. (2016). Pemeriksaan variabel yang memdampaki keterusterangan data moneter lokal melalui situs. *Konferensi Umum Pembukuan XIX Lampung* , 2012 , 26-1. [http://lib.ibs.ac.id/materi/Prosiding/SNA XIX \(19\) Lampung 2016/makalah/099.pdf](http://lib.ibs.ac.id/materi/Prosiding/SNA_XIX_(19)_Lampung_2016/makalah/099.pdf)
- Pahala, M. (2010). Biaya terdekat. Dalam *Buku Harian Pengeluaran Provinsi* . Rajawali Press.
- Rustam, A., R, MN, Jam'an, A., dan Firdaus, F. (2021). Kecukupan Mempromosikan Pengeluaran Pengeluaran Penghasilan Unik Teritorial Pemerintahan Jeneponto. *Pardon: Catatan Eksplorasi Penilaian*, 4 (2), 278-286. <https://doi.org/11.26618/jrp.v4i2.6326>

- Sugiyono. (2017a). Strategi penelitian. Dalam Strategi Eksplorasi Subyektif . Set surat.
- Sugiyono. (2017b). Strategi Eksplorasi Instruktif: Pendekatan Kuantitatif, Subyektif dan Penelitian dan Pengembangan . Set surat.
- Yani, A. (2013). Hubungan Moneter antara Legislatif Pusat dan Daerah di Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada). Rajawali Press.